RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RANKIR RENJA 2025)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN NGANJUK 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga Kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 serta Prioritas Pembangunan Nasional melalui NAWA CITA oleh Pemerintahan Presiden Jokowi tentang kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara termasuk dalam hal kebencanaan maka Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk ini disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai khususnya dengan memuat indikator kinerja (performance indicator) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Melalui dukungan berbagai pihak yang terkait, kami berharap Ranwal Renja BPBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Nganjuk, Juni 2024
Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



SUHARONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690905 199003 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah SKPD 15

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 16

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 17

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan 18

BAB V PENUTUP

5.1 Sinergitas Program dan Kegiatan 23

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 23

5.3 Rencana Tindak Lanjut 24

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam konteks permberdayaan masyarakat di bidang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat dari dampak Bencana. Di sisi lain, dalam era globalisasi, BPBD Kabupaten Nganjuk dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, berpihak kepada masyarakat terhadap dampak dari bencana, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sebagaimana yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BPBD dan pada akhirnya Renja BPBD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;

28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan MinimalSub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor1);
43. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
44. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 yang tertuang

dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023;

b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh BPBD melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra BPBD Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tribulan II Tahun 2024 (Target Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat DaerahTahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat DaerahTahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tribulan II (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				**Urusan Wajib**									
1	01			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	01	01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah** **(Rata-rata realisasi capaian Kegiatan)**	**83,75**	**80,75**	**83,30%**	**80,05%**	**96,10%**	**83,50**	**244,30**	**2,91%**
1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	5 jenis	3 jenis	**60%**
1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	2 jenis	**67%**
1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	1 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0%	1 jenis	1 jenis	**100%**

1	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 jenis	1 jenis	0 jenis	0	0	0 jenis	0 jenis	**0%**
1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100 %	6 jenis	6 jenis	**100%**
1	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sub kegiatan pengadaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan	1 jenis	5 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	3 jenis	1 jenis	**100%**
1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	**100%**
1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan	5 jenis	4 jenis	4 jenis	4jenis	100%	5 jenis	5 jenis	**100%**
1	05	03		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanggulangan Bencana Yang meliputi :** Mitigasi dan kesiapsiagaan, Penanganan darurat serta Penanganan pasca bencana	**100%** **100%** **100%**		**90,62%** **100%** **90%**			**100%** **100%** **100%**		**0%**
1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan informasi rawan bencana yang dilakukan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	2 jenis	0 jenis	**0%**
1	05	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dilakukan	6 jenis	6 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	6 jenis	3 jenis	**50%**
1	05	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan evakuasi yang berhasil dilaksanakan	4 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	4 jenis	2 jenis	**50%**
1	05	03	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah sub kegiatan sistem dasar penanggulangan bencana yang dilaksankan	4 jenis	-	0 jenis	0 jenis	0%	4 jenis	0 jenis	**0%**

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.1.2

Kategorisasi Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.3

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96,10	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Sudah berjalannya komitmen pelayanan administrasi dengan baik sehingga realisasi indikator kinerja berupa Nilai SAKIP tahun 2023 yaitu 80,05 dengan kategori Nilai A	Target renstra belum tercapai	Mengalokasikan anggaran sesuai perencanaan dengan memperhatikan pelayanan administrasi umum sesuai rencana aksi yang tepat waktu
Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**

Program Penanggulangan Bencana		
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Komitmen terhadap standar pelayanan minimal sudah dilaksanakan sehingga realisasi indikator kinerja berupa Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2023 adalah 91,75 dari target renstra 65,47 sehingga capaiannya 65,07%	Target renstra belum tercapai	Fokus penerapan SPM dan pelaksanaan paradigma baru sesuai arahan wakil presiden dalam Rakornas PB 25 April 2024 bahwa kunci utama dalam mengurangi resiko terjadi bencana yaitu pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana yang perlu ditingkatkan

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2023*	2024	2025	2026	2026
1	Persentase desa tangguh bencana	$\frac{\text{Jumlah destana yang dibentuk}}{\text{Jumlah lokasi pembentukan destana}} \times 100$	%	71	81	91	100	100
2	Rata-rata kejadian bencana	Rata-rata kejadian bencana yang x 100	menit	90	90	80	70	70

	yang direspon dan ditangani	direspon dan ditangani / Target waktu pada tahun berkenaan						
3	Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA	Jumlah ban yang diberikan /direalisasikan / Jumlah ban yang harus diberikan berdasarkan JITUPASNA x 100	%	77,5	78	79	80	80

Tabel 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2026
1	Persentase desa tangguh bencana	Jumlah destana yang dibentuk / Jumlah lokasi pembentukan destana x 100	desa	71	81	91	100	100
2	Persentase pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	Jumlah peralatan penanggulangan bencana yang kondisinya baik / Jumlah peralatan penanggulangan bencana x 100	%	n/a	80	80	85	90
3	Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini/*Early Warning System* (EWS)	Jumlah EWS yang berfungsi efektif / Jumlah seluruh EWS x 100	%	n/a	75	77	80	88
4	Persentase korban selamat akibat bencana	Jumlah korban selamat akibat bencana / Jumlah korban bencana x 100	%	n/a	70	75	80	90
5	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana	Jumlah korban yang terpenuhi kebutuhan dasar minimum / Jumlah korban bencana yang memerlukan kebutuhan dasar x 100	%	n/a	80	85	90	95

6	Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA	$\frac{\text{Jumlah ban yang diberikan /direalisasikan}}{\text{Jumlah ban yang harus diberikan berdasarkan JITUPASNA}} \times 100$	%	77,5	78	79	80	80

Tabel 2.2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator	SPM	IK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2026	
	Sub Urusan Bencana									BPBD
1.	Jumlah data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	0	0	0	0	-	KRB terakhir disusun 2021 dan rencana akan dimutakhirkan 2024
2.	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	100%	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	100%	100%	100%	-	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana adalah 891.054 jiwa dan semuanya telah terfasilitasi informasi bencana dari media online dan broadcast rutin termasuk yang offline berupa pemasangan rambu dan jalur evakuasi serta pamflet/brosur informasi kebencanaan
3.	Jumlah data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	1	0	0	0	-	RPB terakhir disusun 2021dan direncanakan tiap 5 tahun sekali akan dimutakhirkan
4.	Jumlah data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon)	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	0	1	1	1	1	Tahun 2021 disusun Renkon Banjir, direncanakan tahun 2022 disusun Renkon Longsor dan tahun 2023 disusun Renkon Karhutla

No.	Indikator	SPM	IK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2026	
5.	Persentase aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100%	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0.30%	0,36%	-	0.30%	0,36%	-	
6.	Persentase warga negara yang berada di kawasan rawan bencana yang mendapatkan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0.30%	0.36%	-	0.30%	0.36%	-	
7.	Persentase warga negara yang berada di kawasan rawan bencana yang mendapatkan layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	100%	-	100%	100%	-	
8.	Persentase warga negara yang berada di kawasan rawan bencana yang mendapatkan	100%		-	-	-	-	-	-	

No.	Indikator	SPM	IK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2026	
	peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana									
9.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 Jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%		-	-	-	-	-	-	
10.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 Jam untuk setiap status darurat bencana	100%		100%	100%	-	100%	100%	-	
11.	Persentase petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%		100%	100%	-	100%	100%	-	
12.	Persentase korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%		100%	100%	-	100%	100%	-	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

- Penyusunan kajian-kajian ilmiah dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana
- Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nganjuk untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- Pembentukan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- Kurangnya peran serta Desa dalam penguatan kelembagaan Destana
- Belum adanya Perda Penanggulangan Bencana
- Belum ada SOP Penanganan cepat bencana
- Kurangnya alat kesiapsiagaan dan penanganan bencana
- Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penanganan penanggulangan bencana

2.3.3. Isu-isu penting dan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPBD Kabupaten Nganjuk yaitu:

a. Perlu penguatan kelembagaan Destana oleh perangkat daerah yang terkait dan bersinergi dengan BPBD.
b. Perlu segera menyusun Perda Penanggulangan Bencana.
c. Perlu menyusun SOP Penanganan cepat bencana.
d. Perlunya penyediaan alat kesiapsiagaan dan penanganan bencana
e. Perlunya penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penanganan penanggulangan bencana.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Pengumpulan Data Berkala, terhadap :
   a. Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima
   b. Jumlah barang dan/atau jasa yang sudah tersedia dan yang dibutuhkan
   c. Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yang masih dibutuhkan
2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar, dengan :
   a. Menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima
   b. Menyusun kebutuhan untuk pemenuhannya
3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
   a. RPJMD dan RKPD
   b. Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi
4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar
   a. Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana sesuai dengan standar teknis SPM
   b. Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah “Nganjuk Yang Maju, Adil, dan Sejahtera”, dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya.
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur.
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tenteram, tertib, dan damai.
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman, dan lestari.

Dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang dimaksud dijabarkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang akuntabel.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya, serta tangguh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah terhadap Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya, serta tangguh

5. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota pada sub urusan bencana terdiri atas:
   a. Pelayanan informasi rawan bencana;
   b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
   c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Tabel 2.3.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**83,75**	**4.604.382.630**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**83,75**	**3.994.334.310**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**BPBD**	**Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**5 jenis**	**28.342.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**BPBD**	**Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**5 jenis**	**28.248.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	7 dokumen	5.399.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	7 dokumen	6.144.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	BPBD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.521.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	BPBD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.386.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPBD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.521.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPBD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.398.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	BPBD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu	3 dokumen	9.938.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	BPBD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu	3 dokumen	9.528.000	

	SKPD					SKPD					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	6 dokumen	9.963.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	6 dokumen	9.792.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**BPBD**	**Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**3 jenis**	3.122.478.900	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**BPBD**	**Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**3 jenis**	**2.761.760.001**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD	Jumlah kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	18 orang/bulan	3.111.979.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD	Jumlah kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	**2.753.179.001**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu	1 dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu	1 dokumen	2.901.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD	Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu	12 dokumen	6.999.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPBD	Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu	12 dokumen	5.680.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**BPBD**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD**	**1 Jenis**	**12.500.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**BPBD**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD**	**1 Jenis**	**12.500.000**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPBD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**BPBD**	**Jumlah sub kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**1 jenis**	40.000.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**BPBD**	**Jumlah sub kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**1 jenis**	**34.160.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD	Jumlah aparatur yang tercukupi pakaian dinas	60 orang	40.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD	Jumlah aparatur yang tercukupi pakaian dinas	60 orang	34.160.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**BPBD**	**Dokumen Umum Perangkat Daerah yang disusun**	**6 jenis**	267.530.730	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**BPBD**	**Dokumen Umum Perangkat Daerah yang disusun**	**6 jenis**	**299.098.320**	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 jenis	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 jenis	7.000.720	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 jenis	32.120.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	2 jenis	51.041.850	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPBD	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 jenis	6.998.480	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPBD	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 jenis	7.477.750	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPBD	Jumlah paket bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	3 jenis	6.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPBD	Jumlah paket bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	3 jenis	3.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD	Jumlah laporan fasilitasi tamu	2 jenis	15.321.250	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD	Jumlah laporan fasilitasi tamu	2 jenis	21.988.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11 bulan 180 kali	197.691.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	180 laporan	208.590.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**BPBD**	**Jumlah sub kegiatan pengadaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan**	**2 jenis**	**608.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BPBD**	**Jumlah sub kegiatan pengadaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan**	**1 jenis**	**352.830.489**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	8 jenis	508.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	8 jenis	352.830.489	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	BPBD	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	1 SIM	100.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	BPBD	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	0 SIM	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**BPBD**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	2 jenis	**92.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BPBD**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	2 jenis	**102.600.000**	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1800 surat	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1700 surat	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	23000 Kwh, 50Mbps	90.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	100.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**BPBD**	**Jumlah sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan**	**4 jenis**	**383.531.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BPBD**	**Jumlah sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan**	**5 jenis**	**403.137.500**	
	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	26 unit	325.000.000	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	35 unit	324.869.200	
	Pemeliharaan Mebel	BPBD	Jumlah mebel yang dipelihara	8 jenis	9.000.000	Pemeliharaan Mebel	BPBD	Jumlah mebel yang dipelihara	271 unit	14.950.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	12 jenis	29.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	20 unit	39.213.600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	484 m^2	15.531.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	15.854.700	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	8.250.000	
2	**Program Penanggulangan Bencana**	**BPBD**	**Persentase Penanggulangan Bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat**	**100%**	**2.785.798.700**	**Program Penanggulangan Bencana**	**BPBD**	**Persentase Penanggulangan Bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat**	**83,33**	**3.119.295.100**	

			serta penanganan pasca bencana)					**serta penanganan pasca bencana)**			
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**BPBD**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**1.103.902 jiwa* (Jumlah warga di 20 kecamatan)** ***Nganjuk Dalam Angka 2021**	**157.000.000**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**BPBD**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**1 jenis**	**66.673.530**	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	BPBD	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	450 orang	157.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	BPBD	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	170 orang	66.673.530	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**BPBD**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Warga di 20 kecamatan**	**1.934.340.200**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**BPBD**	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**6 jenis**	**1.866.018.900**	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun untuk dimutakhirkan	1 dokumen	150.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun untuk dimutakhirkan	1 dokumen	324.795.500	
	Pelatihan Pencegahan dan	BPBD	Jumlah kegiatan	300 orang	240.000.000	Pelatihan Pencegahan dan	BPBD	Jumlah warga negara	8 kawasan	216.435.000	

	Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		pelatihan yang diadakan			Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana			
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BPBD	Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 lokasi	62.250.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BPBD	Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	100 unit	26.425.000	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah desa rawan bencana tempat dilakukan mitigasi struktural	10 desa	35.253.300	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang Tertangani	1 kegiatan	34.876.600	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	Jumlah lokasi kegiatan penguatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan	10 desa	50.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 kawasan	78.075.000	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah tenaga harian lepas yang menangani kebencanaan	38 orang	1.300.550.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah tenaga harian lepas yang menangani kebencanaan	38 orang	1.199.888.000	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	Jumlah gelar apel kesiapsiagaan yang dilaksanakan	1 kegiatan	96.286.900	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD	Jumlah gelar apel kesiapsiagaan yang dilaksanakan	600 orang	63.598.800	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**BPBD**	**Persentase penanganan tanggap darurat**	**100%**	349.958.500	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**BPBD**	**Persentase penanganan tanggap darurat**	**100%**	**447.819.350**	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	SK penetapan status darurat bencana dan skpdb yang ditetapkan paling lama 1x24 jam	100 persen	154.355.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang	25 Dokumen	154.349.100	

			berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat					Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	100 persen	40.532.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 orang	44.717.750	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	5 jenis	135.071.500	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	325 orang	228.777.500	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	BPBD	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	100 laporan	20.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	BPBD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100 laporan	19.975.000	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**BPBD**	**Jumlah sub kegiatan sistem dasar PB yang dilaksanakan**	**4 jenis**	**344.500.000**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**BPBD**	**Jumlah sub kegiatan sistem dasar PB yang dilaksanakan**	**4 jenis**	**738.783.300**	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah kegiatan forum PRB	1 dokumen	46.500.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah	2 dokumen	187.480.700	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 kegiatan	78.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 dokumen	68.380.400	
	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	100 persen	70.000.000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	BPBD	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	5 kegiatan	382.922.200	

			Provinsi yang dilegalkan					Provinsi yang dilegalkan			
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	BPBD	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 dokumen	150.000.000	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	BPBD	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	100.000.000	

2.4. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang teridentifikasi saat ini dalam pelaksanaan program BPBD Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

a. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Nganjuk;
b. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam;
c. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam;
d. Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana, antaran lain : Banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, serta bencana yang timbul akibat kegagalan teknologi.
e. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
f. Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih perlu terus ditingkatkan;
g. Sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Nganjuk sangat terbatas dan perlu adanya penambahan jumlah pegawai, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sangat luas;
h. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, tidak adanya aplikasi untuk penunjang pengelolaan data untuk membantu dan mempercepat kinerja kegiatan dan pelaporan penanganan bencana,
i. Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui sarana dan prasarana berbasis teknologi;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesiyang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan

pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 mengangkat tema "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra produksi melalui peran aktif Koperasi
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta peningkatkan Toleransi Antarumat Beragama untuk mencapai masyarakat yang Adil dan Makmur

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 menuntut upaya konkrit, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan kontribusi dalam prioritas ke delapan yaitu “memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah “**Meningkatnya Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana**”, adapun sasaran yang akan dicapai adalah **“Meningkatnya ketangguhan penanggulangan bencana yang meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta penanganan pasca bencana”**, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatkannya ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,60
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
- Meningkatnya ketangguhan penanggulangan bencana yang meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta penanganan pasca bencana	Persentase desa tangguh bencana	91
	Rata-rata kejadian bencana yang direspon dan ditangani	80
	Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA	79

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		5 Jenis
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	BPBD	3 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPBD	1 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	BPBD	1 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu	BPBD	3 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	BPBD	3 dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun		3 Jenis
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	BPBD	15 orang/bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu	BPBD	1 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu	BPBD	12 dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun		1 Jenis
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang yang disusun	BPBD	1 dokumen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Kepegawaian Peangkat Daerah yang dilaksanakan		1 Jenis
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah aparatur yang tercukupi pakaian dinas	BPBD	60 paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan		7 Jenis

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPBD	10 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	BPBD	2 paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	BPBD	7 paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan	BPBD	1 dokumen
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi tamu yang disediakan	BPBD	2 laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Luar /Dalam Daerah	180 laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sub kegiatan pengadaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan	BPBD	1 Jenis
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	BPBD	24 unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	BPBD	2 Jenis
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses	BPBD	1700 surat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan listrik dan kebutuhan telepon internet	BPBD	12 laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	5 jenis
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	BPBD	35 unit
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	BPBD	271 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	BPBD	20 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPBD	3 unit

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi	BPBD	10 unit
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta penanganan pasca Bencana)	BPBD	83,33
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang Dilakukan	BPBD	1 jenis
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta Sosialisasi pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	Kab. Nganjuk	170 orang
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dilakukan	BPBD	6 jenis
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang Tertangani	Kab. Nganjuk	1 kegiatan
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Kab. Nganjuk	100 unit
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	600 orang
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	BPBD	38 orang
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun untuk dimutakhirkan	BPBD	1 dokumen
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana	Kab. Nganjuk	8 kawasan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan evakuasi yang berhasil Dilaksanakan	Kab. Nganjuk	100 persen
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab. Nganjuk	25 Dokumen
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab. Nganjuk	10 orang
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Nganjuk	325 orang
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	BPBD	100 laporan
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah sub kegiatan system dasar penanggulangan bencana yang dilaksanakan	Kab. Nganjuk	4 jenis
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Nganjuk	1 dokumen
Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kab. Nganjuk	5 kegiatan
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Nganjuk	2 dokumen
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD	1 dokumen

3.3.1. Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan target 100% (seratus persen) untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun yang terdiri 3 (tiga) layanan dasar dengan target sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

Sumber: Permendagri Nomor 100 Tahun 2018

3.3.2. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPD) 2024-2026 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan BPBD dalam melaksanakan sub urusan bencana.

Tabel 4.1

Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi(2025)
1	Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman dan Keamanan untuk menuju masyarakat yang berbudaya	7.113.629.410

Tabel 4.2

Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2025)	Alokasi (2025)
1	- Meningkatnya ketangguhan penanggulangan bencana yang meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta penanganan pasca bencana	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	83,50	4.604.382.630
		Persentase desa tangguh bencana	91	2.180.586.900
		Rata-rata kejadian bencana yang direspon dan ditangani	80	349.958.500
		Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan jitupasna	79	255.253.300

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.994.334.310				4.657.789.030
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		5 Jenis	28.248.000			5 Jenis	30.728.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	BPBD	3 dokumen	6.144.000	DTU-DAU		3 dok umen	5.409.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPBD	1 dokumen	1.386.000	DTU-DAU		1 dokumen	2.709.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	BPBD	1 dokumen	1.398.000	DTU-DAU		1 dokumen	2.709.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu	BPBD	3 dokumen	9.528.000	DTU-DAU		3 dokumen	9.938.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	BPBD	3 dokumen	9.792.000	DTU-DAU		3 dokumen	9.963.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun		3 Jenis	2.761.760.001			3 Jenis	3.484.099,900
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	BPBD	15 orang/bulan	2.753.179.001	DTU-DAU		18 orang/bulan	3.473.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu	BPBD	1 dokumen	2.901.000	DTU-DAU		1 dokumen	3.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu	BPBD	12 dokumen	5.680.000	DTU-DAU		12 dokumen	6.999.900
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun		1 Jenis	12.500.000			1 Jenis	12.500.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang yang disusun	BPBD	1 dokumen	12.500.000	DTU-DAU		1 dokumen	12.500.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Kepegawaian Peangkat Daerah yang dilaksanakan		1 Jenis	34.160.000			1 Jenis	40.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah aparatur yang tercukupi pakaian dinas	BPBD	60 paket	34.160.000	DTU-DAU		60 paket	40.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Umum		7 Jenis	299.098.320				282.839.730

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perangkat Daerah yang Dilaksanakan							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPBD	10 paket	7.000.720	DTU-DAU		10 paket	7.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	BPBD	2 paket	51.041.850	DTU-DAU		2 paket	32.120.400
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	BPBD	7 paket	7.477.750	DTU-DAU		7 paket	6.998.480
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan	BPBD	1 dokumen	3.000.000	DTU-DAU		3 dokumen	6.400.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi tamu yang disediakan	BPBD	2 laporan	21.988.000	DTU-DAU		2 paket	15.321.250
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Luar /Dalam Daerah	180 laporan	208.590.000	DTU-DAU		185 laporan	213.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sub kegiatan pengadaan barang milik daerah SKPD yang	BPBD	1 Jenis	352.830.489				499.399.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dilaksanakan							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	BPBD	24 unit	352.830.489	DTU-DAU		5 jenis	349.399.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	BPBD	2 Jenis	102.600.000			2 Jenis	92.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses	BPBD	1700 surat	2.000.000	DTU-DAU		1800 surat	2.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan listrik dan kebutuhan telepon internet	BPBD	12 laporan	100.600.000	DTU-DAU		12 laporan	90.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	5 jenis	403.137.500				383.531.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	BPBD	35 unit	324.869.200	DTU-DAU		29 unit	325.000.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	BPBD	271 unit	14.950.000	DTU-DAU		271 unit	9.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	BPBD	20 unit	39.213.600	DTU-DAU		20 unit	29.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPBD	3 unit	15.854.700	DTU-DAU		484 m2	15.531.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi	BPBD	10 unit	8.250.000	DTU-DAU		10 unit	5.000.000
TOTAL RUTIN				3.994.334.310				4.657.789.030
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta penanganan pasca Bencana)	BPBD	83,33	3.119.295.100				2.288.907.240
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang Dilakukan	BPBD	1 jenis	66.673.530			1 jenis	157.000.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta Sosialisasi pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	Kab. Nganjuk	170 orang	66.673.530	DTU-DAU		450 orang	157.000.000
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jenis Pelayanan Pencegahan dan	BPBD	6 jenis	1.866.018.900			6 jenis	1.955.340.200

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terhadap Bencana	Kesiapsiagaan yang dilakukan							
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang Tertangani	Kab. Nganjuk	1 kegiatan	34.876.600	DTU-DAU		1 kegiatan	35.253.300
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Kab. Nganjuk	100 unit	26.425.000	DTU-DAU		10 lokasi	62.250.000
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	600 orang	63.598.800	DTU-DAU		1 kegiatan	117.286.900
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	BPBD	38 orang	1.199.888.000	DTU-DAU		38 orang	1.300.550.000
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun untuk dimutakhirkan	BPBD	1 dokumen	324.795.500	DTU-DAU			
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk	Kab.	8 kawasan	216.435.000	DTU-DAU		300 orang	240.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kabupaten/Kota	kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana	Nganjuk						
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan evakuasi yang berhasil Dilaksanakan	Kab. Nganjuk	100 persen	447.819.350			100 persen	425.958.500
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab. Nganjuk	25 Dokumen	154.349.100	DTU-DAU		100 persen	230.355.000
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab. Nganjuk	10 orang	44.717.750	DTU-DAU		100 persen	40.532.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Nganjuk	325 orang	228.777.500	DTU-DAU		5 jenis	135.071.500
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	BPBD	100 laporan	19.975.000	DTU-DAU		100 laporan	20.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah sub kegiatan system dasar penanggulangan bencana yang dilaksanakan	Kab. Nganjuk	4 jenis	738.783.300			4 jenis	344.500.000
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Nganjuk	1 dokumen	68.380.400	DTU-DAU		2 kegiatan	78.000.000
Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kab. Nganjuk	5 kegiatan	382.922.200	DTU-DAU		4 kegiatan	70.000.000
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Nganjuk	2 dokumen	187.480.700	DTU-DAU		2 kegiatan	46.500.000
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BPBD	1 dokumen	100.000.000	DTU-DAU		1 dokumen	150.000.000
TOTAL BIDANG				3.119.295.100				2.684.798.700

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL RUTIN DAN BIDANG				7.113.629.410				7.342.587.730

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2025 apabila terdapat ketidak sesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan

b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan

3. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

a. Dalam rangka sinergitas kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang, agar proses keegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan yang berdaya guna dan berhasil guna.

b. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

c. Dalam pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Pj. BUPATI NGANJUK

SRI HANDOKO TARUNA